

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI
DALAM KERJASAMA BAGI HASIL PENGUSAHA KAYU
DENGAN PEMODAL DI DESA GELAM KECAMATAN
CANDI KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh:

Oxy Achmad Yusuf

NIM. C02216057



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
HUKUM EKONOMI SYARIAH
SURABAYA**

2020

PENYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Oxy Achmad Yusuf

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan/Prodi : Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Kerjasama Bagi Hasil Pengusaha Kayu Dengan Pemodal Di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian Karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Oxy Achmad Yusuf

Nim. C02216057

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Oxy Achmad Yusuf NIM. C02216057 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Juli 2020
Pembimbing,



Drs. H. Akh Mukarram, M.Hum
NIP. 195609231986031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Oxy Achmad Yusuf NIM C02216057 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa , tanggal 3 Agustus 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Drs. H. Akh Mukarram, M.Hum
NIP. 195609231986031002

Penguji II,

Dr. Nurlailatul Masyafaah, LC.M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji III,

Mh. Hatta, S.Ag., M.HI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV,

Achmad Safudin, R., MH
NIP. 199212292019031005

Surabaya, 2 September 2020

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. H Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Oxy Achmad Yusuf
NIM : C02216057
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : Oxyachmadyusuf1112@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI DALAM KERJASAMA BAGI HASIL PENGUSAHA KAYU DI DESA GELAM KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Juli 2020

Penulis

Oxy Achmad Yusuf

tidak diperkenankan meminta gaji atau kompensasi lainnya untuk hasil kerjanya.

Pengusaha kayu di Desa Gelam Kab Sidoarjo. Pengusaha ini telah berdiri tahun 2010, lokasi pengusaha kayu ini sangat strategis dimana lokasi tersebut berada di Desa Gelam Kab Sidoarjo. Pengusaha kayu ini yang memiliki yaitu bapak Edi. Usaha ini telah beliau rintis pada tahun 2010. Usaha kayu yang ada ditempat ini memiliki kualitas yang bagus.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana praktik kerjasama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan sistem menggunakan akad Mudharabah pada saat perjanjian sudah harus disepakati nisbah bagi hasil antara pemodal dengan pengelola, besarnya bagi hasil kedua belah pihak tidak diatur dalam Syariah, akan tetapi diatur dalam kesepakatan yang mereka buat.

Pada mulanya pemilik modal bernama ibu Yuli akan mengadakan perjanjian kerjasama dengan bapak Edi selaku pemilik pengusaha kayu. Kerjasama tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan yang dimana setiap bulannya akan ada bagi hasil.

Bagi hasil antara pemilik modal dengan pengusaha kayu sebesar 3%. Kegiatan usaha bapak Edi pemilik pengusaha kayu pada awal mulanya berjalan dengan lancar, pada tahun pertama yaitu tahun 2010 pemilik modal bekerja sama dengan pengusaha kayu berjalan dengan lancar.

Selanjutnya pada pertengahan tahun 2011 pengusaha kayu milik bapak Edi terjadi problematika yaitu pengusaha kayu tidak mampu membayar karena uang dari pemodal digunakan untuk kebutuhan usaha dan pemodal tetap berusaha mengingatkan pengusaha kayu untuk mengembalikan dana bagi hasilnya sehingga mengakibatkan terjadinya kelalaian tidak menyetor bagi hasil yang telah disepakati antara pemilik modal dengan pengusaha kayu. Ketika terjadi kelalaian tidak menyetor kewajiban bagi hasil tersebut terjadilah ingkar janji didalam kesepakatan antara pemilik modal dengan pengusaha kayu, ingkar janji tersebut disebut dengan wanprestasi. Oleh karena itu, penulis tertarik mengambil judul penelitian sebagai berikut:

Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Kerjasama Bagi Hasil Pengusaha Kayu di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

wanprestasi bersifat khusus dalam kerjasama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Metode ini bertujuan mendeskripsikan permasalahan yang ada untuk kemudian mendapatkan kesimpulan dan kejelasan hukum Islam terhadap praktik kerja sama usaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami tentang permasalahan yang diteliti, penulis membagi menjadi lima bab, dimana dalam proses penyusunan bab satu dengan bab lainnya saling keterkaitan dan tiap bab dibagi dalam sub-sub. Dibawah ini akan diuraikan secara sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab pertama pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, defisi operasional, metode penelitian yang meliputi: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisa data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang mendukung dalam penelitian sub bab pertama adalah pembahasan mengenai bagi hasil (*M{uda>rabah}*) dalam hukum Islam yang isinya adalah meliputi pengertian *M{uda>rabah}*, fiqh empat madzab tentang *M{uda>rabah}*, dasar hukum *M{uda>rabah}*, rukun dan syarat *M{uda>rabah}*, macam-macam *M{uda>rabah}*, hukum Islam tentang kelalaian

Bab kedua penulis akan membahas mengenai pengertian wanprestasi menurut hukum Islam dan hukum perdata, bentuk dan syarat wanprestasi, penyebab terjadinya wanprestasi, akibat hukum wanprestasi, penyelesaian wanprestasi dalam bagi hasil.

Bab ketiga berisi tentang profil lokasi pengusaha kayu, profil singkat pengusaha kayu. Profil singkat pengusaha kayu terdiri dari sejarah singkat pengusaha kayu, lokasi pengusaha kayu, struktur organisasi, tata cara menjalankan usaha kayu, Kemudian berisi tentang pelaksanaan akad dan praktik kerjasama bagi hasil antara pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, penyelesaian wanprestasi antara pengusaha kayu dengan pemodal

Bab keempat merupakan hasil analisis dari hasil penelitian yang terdapat pada bab tiga. Dalam bab ke empat ini memiliki tiga sub bab, yaitu: sub bab pertama berisi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akad dan praktik kerjasama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Sub bab kedua membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan Wanprestasi dalam kerjasama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Sub bab ketiga membahas tentang analisis hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam kerjasama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan proporsi (*nisbah*) keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak.

Pembagian keuntungan harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk prosentase seperti 50:50, 60:40, 70:30, atau bahkan 99:1 menurut kesepakatan bersama. Biasanya, dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan notaris. Dengan demikian, apabila terjadi persengketaan, maka penyelesaiannya tidak begitu rumit.

Karakteristik dari akad *Mu}da>rabah* adalah pembagian untung dan bagi rugi atau *profit and loss sharring* (PLS), dalam akad ini *return* dan *timing cash flow* tergantung kepada kinerja riilnya. Apabila laba dari usahanya besar maka kedua belah pihak akan mendapatkan bagian yang besar pula.

Tapi apabila labanya kecil maka keduanya akan mendapatkan bagian yang kecil pula. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kontrak, jadi angka besaran nisbah ini muncul dari hasil tawar menawar antara *Sha>hibu}l Ma>l* dengan *Mu}dha>rib*, dengan demikian angka nisbah ini bervariasi seperti yang sudah disebutkan diatas, namun para fuqaha sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran. Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam pasal 1246 KUHPerdara, yang terdiri dari tiga macam, yaitu: biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan bunga adalah segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya.

Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.

b. Pembatalan Perjanjian

Sebagai sangsi yang kedua akibat kelalaian seorang debitur yaitu berupa pembatalan perjanjian. Sangsi atau hukuman ini apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya

Sebagaimana digariskan, bahwa pelaksanaan kerjasama antara kreditur dengan debitur harus berdasarkan prinsip syariah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan Hukum Islam. Dengan demikian, menurut hubungan yang terjadi antara pihak kreditur dan debitur, harus didasarkan pada syariat Islam. Pola hubungan yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan system syariah tersebut diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara pihak kreditur dan debitur. Jika terjadi perselisihan pendapat, baik dalam penafsiran maupun isi perjanjian, kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah menurut ajaran Islam.

Cara penyelesaian kredit bermasalah dilakukan melalui analisa pengamatan dan perhitungan terhadap kondisi dari nasabah dan mengambil kesimpulan cara penyelesaian yang tepat adalah bisa dilakukan melalui musyawarah, walaupun tidak menutup kemungkinan apabila musyawarah tidak tercapai dan untuk menutup kerugian pihak bank, pihak bank dapat melakukan penyelesaian melalui jaminan yang diberikan.

Dalam perjanjian pembiayaan *Mudharabah*, wanprestasi biasanya disebabkan oleh dua faktor, adalah:

1. Dari Pihak Kreditur.

Artinya didalam sebuah analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya.

Dapat pula terjadi karena kondisi dari pihak analisis pembiayaan

Berdasarkan keterangan diatas, bahwa upaya penyelesaian kredit yang bermasalah dapat dilakukan penyelesaian kredit oleh kreditur dicantumkan dalam akad, penyelesaian kredit dapat berupa:

- a. *Reschedulling* (penyelamatan kembali), yaitu supaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu pembiayaan termasuk tenggang, termasuk perubahan jumlah angsuran.
- b. *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan seluruh persyaratan perjanjian yang tidak hanya terbatas pada perubahan angsuran atau jangka waktu pembiayaan. Tetapi perubahan pembiayaan tersebut tanpa memberikan tambahan pembiayaan atau memberikan konversi atas seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi *equity* perusahaan.
- c. *Restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan yang dilakukan dengan atau tanpa *Rescheduling* atau *Reconditioning*.

Penyelesaian yang dilakukan melalui *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring* diharapkan memungkinkan

pembiayaan diselamatkan tidak hilangnya dana pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan diluar perhitungan yang diharapkan.

Sebagaimana digariskan, bahwa Kreditur berdasarkan Prinsip Syariah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan Hukum Islam. Dengan demikian, menurut hubungan yang terjadi antara pihak Kreditur dengan Debitur, harus berdasar kepada Syariat Islam. Pola hubungan yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan system Syariah tersebut diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara Kreditur dan Debitur.

Jika terjadi perselisihan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi perjanjian, kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah menurut ajaran Islam.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tetap saja ada kemungkinan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka dari itu haruslah segera mungkin diantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Untuk mengantisipasi keinginan tersebut, Kreditur Berdasarkan Prinsip Syariah. Serta para kedua belah pihak menyadari bahwa perselisihan tersebut harus diselesaikan dengan jalan musyawarah sesuai dengan prinsip Syariat Islam.

Planning pada pengusaha kayu ini juga dilakukan dengan membuat proyeksi pendapatan dan pengeluaran pengusaha kayu. Proyeksi dilakukan dengan memprediksi posisi kas untuk periode tertentu di masa mendatang. Langkah yang dilakukan adalah dengan memprediksi penerimaan dan pengeluaran berbasis rencana operasional pengusaha. Kemudian juga menyusun proyeksi kebutuhan dana atau kredit untuk menutup defisit kas juga disusun proyeksi pembayaran bunga.

Aktivitas *planning* pada pengusaha kayu milik Bapak Edi juga dilakukan dengan melakukan perencanaan kegiatan produksi. Proses kegiatan produksi dilakukan berdasarkan jadwal yang dibuat oleh kepala bagian produksi, sehingga karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya disesuaikan dengan jadwal tersebut.

2. *Organizing*

Fungsi *organizing* aspek sumber daya manusia pada pengusaha kayu berkaitan dengan menarik seseorang ke dalam pengusaha kayu dilakukan melalui mengumumkan kepada karyawan apabila pengusaha kayu membutuhkan karyawan dan memasang iklan di surat kabar. Setiap karyawan yang masuk di perusahaan melalui proses rekrutmen dan seleksi. Karyawan yang direkrut oleh pengusaha kayu bersumber dari luar. Sebelum menjadi karyawan di pengusaha kayu, setiap karyawan akan menghadapi masa magang paling lama 1 bulan terhitung sejak pelamar mulai bekerja di pengusaha kayu.

Fungsi *controlling* pada usaha kayu dilakukan dengan cara mengadakan evaluasi terhadap kinerja karyawan setiap bulannya. Fungsi pengendalian diterapkan pada usaha kayu sebagai upaya memberikan penilaian apakah karyawan sudah berkontribusi secara maksimal sesuai dengan tanggung jawab pekerjaannya atau tidak. Sedangkan cara pengusaha kayu melakukan penilaian kinerja karyawan adalah dilakukan oleh pemilik usaha kayu dengan melihat hasil kerja karyawan serta memantau kedisiplinan dan perilaku kerja karyawan. Penilaian dilakukan berdasarkan kinerja karyawan selama sebulan. Untuk karyawan bagian produksi akan dilihat dari kerapian, kebersihan, presisi (sesuai ukuran mebel), dan waktu menyelesaikan pekerjaan. Pengawasan terhadap karyawan dilakukan dengan menerapkan absensi untuk melihat kedisiplinan karyawan.

Controlling juga dilakukan pada bagian keuangan perusahaan. Perusahaan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan perusahaan dengan melakukan pengawasan biaya agar biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan bisnis dapat digunakan secara efektif dan efisien. Selain itu, pemilik usaha kayu juga tidak setiap waktu meminta laporan keuangan usaha kayu. Bagian keuangan juga memberikan laporan keuangan secara rutin kepada pemilik setiap bulannya.

Controlling juga dilakukan dengan pemantuan kegiatan produksi perusahaan. Fungsi pengawasan dijalankan oleh kepala bagian yang memantau secara langsung aktivitas produksi. Pemilik usaha kayu

Gambar 3.2 Kayu sebelum diproses

Pemodal memberikan uang kepada pengusaha kayu pengusaha kayu sebesar Rp 5.000.000. Pengusaha kayu memulai menjalankan usahanya pada tahun 2010, usaha Bapak Edi selaku pemilik usaha kayu berjalan dengan lancar. Bapak Edi mencari kayu kemudian setelah itu kayu tersebut disemir, kayu jati.

Kayu yang keras untuk pabrik. Kemudian untuk praktiknya Bapak Edi memiliki karyawan sejumlah 12 orang apabila usahanya lancar, apabila usahanya sepi maka Bapak Edi hanya memiliki 4 karyawan.



Gambar 3.3 Kayu sesudah diproses

Selama usaha Bapak Edi lancar Bapak Edi masih memenuhi akad yang sudah disetujui diawal perjanjian sebesar 3%. Usaha Bapak Edi lancar selama satu jangka waktu setahun ini, kemudian memasuki tahun 2011 usaha Bapak Edi terjadi problematika yaitu pengusaha kayu terlambat melakukan kewajiban perjanjian sehingga Bapak Edi selaku pemilik usaha kayu terjadi kelalaian tidak dapat menyetor bagi hasil yang telah disepakati antara pemilik modal dengan pengusaha kayu. Masalah yang terjadi yaitu pengusaha kayu tidak mampu membayar karena uang dari pemodal digunakan untuk kebutuhan usaha dan pemodal tetap berusaha mengingatkan pengusaha kayu untuk mengembalikan dana bagi hasilnya

Ketika pengusaha kayu melakukan kelalaian tidak menyetor kewajiban bagi hasil kepada pemodal maka terjadilah ingkar janji didalam kesepakatan atau akad yang telah disepakati oleh pemilik modal dengan pengusaha kayu, ingkar janji tersebut bisa disebut juga dengan wanprestasi.

D. Penyelesaian Wanprestasi Antara Pengusaha Kayu Dengan Pemodal

Kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah yang dilakukan oleh pengusaha kayu dengan pemodal menurut ajaran Islam. Cara penyelesaian wanprestasi antara pemodal dengan pengusaha kayu dapat dilakukan dengan melalui analisa

pengamatan dan perhitungan terhadap kondisi dari pengusaha kayu terhadap kesanggupan kepada pemodal bahwa menurut musyawarah yang telah dilakukan antara pemodal dan pengusaha kayu sepakat, bahwa pemodal akan menarik bagi hasil dengan secara perlahan.

Pada kesepakatan ini ibu Yuli memberikan selaku pemodal memberikan kesempatan kepada pengusaha kayu yaitu kepada bapak Edi sebesar Rp 2.500.000 untuk mengembalikan bagi hasil yang tertunda, sedangkan bapak Heny juga selaku pemodal juga memberikan kesempatan kepada bapak Edi untuk melunasi bagi hasil secara perlahan sebesar Rp 2.500.000.

Jadi total yang diterima pengusaha kayu sebesar Rp 5.000.000. Untuk bagi hasil $Rp\ 5.000.000 \times 3\% = Rp. 150.000$. Jadi pengusaha kayu memberikan bagi hasil kepada pemodal sebesar Rp. 150.000/bulan, kemudian untuk pengusaha kayu bapak Edi sebesar Rp. $5.000.000 \times 2\% = Rp. 100.000$ setiap bulan.

Dari uraian ayat di atas, dapat dipahami bahwa akad *Mud{a>rabah* dalam Islam merupakan akad yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Untuk saling bertukar keperluan melalui akad kerja sama. Salah satu bentuk kerja sama yang di lakukan di Desa Gelam adalah kerja sama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal.

Dalam bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa dalam kerja sama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, pemilik modal dan pengusaha kayu telah melakukan kesepakatan untuk melakukan kerja sama bagi hasil dengan ketentuan keuntungan bagi hasil yang didapatkan masing-masing pihak setiap bulannya yaitu sebesar 3% untuk pemodal dan untuk sisa hasil keuntungan setelah di bagikan kepada pemilik modal menjadi hak pengusaha.

Perjanjian kerja sama bagi hasil dalam pengusaha kayu dengan pemodal dilakukan secara lisan atas dasar kekeluargaan. Sehingga tidak terdapat bukti tertulis mengenai perjanjian tersebut.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah rukun *mu}{da>rabah* ada enam yaitu :

- Pemilik dana
- Pengelola
- Ijab qabul
- *Modal Pekerjaan*

prestasi sebagaimana dalam perjanjian yang disepakati, namun hal ini sering terjadi perbedaan antara teori dan praktik, seringkali salah satu pihak melakukan wanprestasi, yakni ingkar janji.

Dalam permasalahan ibu Yuli dan bpk Heny (pemodal) dengan bapak Edi (pengusaha kayu), dimana ibu Yuli dan bapak Heny sebagai pemodal, Bpk Edi sebagai pengusaha kayu melakukan sebuah akad kerjasama yang kemudian tidak ada perjanjian tertulis antara kedua belah pihak, kemudian terjadi permasalahan kemacetan dalam pembayaran bagi hasil dari pengelola kepada pemodal, dalam hal ini dirasa dirugikan dari pihak pemodal karena sudah enam bulan tidak memberikan bagi hasil yang sudah disepakati dalam perjanjian.

Pada akhirnya Ibu Yuli dan Bpk Heny memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum Islam penyelesaian wanprestasi dilakukan dengan cara musyawarah yaitu memberikan kesempatan dari pihak yang melakukan wanprestasi untuk melakukan prestasi, jika tidak bisa melakukan prestasi maka pihak yang dirugikan (pemodal) maka dapat memilih jalur hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, dapat dianalisis bahwa yang dilakukan Ibu Yuli dan Bapak Heny sudah sesuai dengan hukum Islam.

Apabila musyawarah tidak tercapai dan untuk menutup kerugian pihak debitur dan kreditur, pihak kreditur dapat melakukan penyelesaian melalui jaminan yang diberikan.

Berdasarkan keterangan diatas, bahwa upaya penyelesaian wanprestasi bagi hasil dapat dilakukan oleh kreditur dalam hal ini dicantumkan dalam akad, penyelesaian wanprestasi bagi hasil dapat berupa:

- a. *Reschedulling* (penyelamatan kembali), yaitu supaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu pembiayaan bagi hasil yang telah disepakati oleh kreditur (pengusaha kayu), dan debitur (pemodal).
- b. *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan seluruh persyaratan perjanjian yang tidak hanya terbatas pada jangka waktu bagi hasil yang telah disepakati oleh pemodal dengan pengusaha kayu. Tetapi perubahan proses pembayaran bagi hasil antara pemodal dengan pengusaha kayu yang telah disepakati tersebut.
- c. *Restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal yang dilakukan dengan atau tanpa *Rescheduling* atau *Reconditioning*.

Penyelesaian yang dilakukan melalui *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restucturing* diharapkan memungkinkan pembiayaan bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal diselamatkan tidak hilangnya dana pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan diluar kesepakatan yang diharapkan.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Dan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Kerjasama Bagi Hasil Pengusaha Kayu Dengan Pemodal Di Desa Gelam Kecamatan Candi Kab Sidoarjo

Permasalahan Wanprestasi ini seperti yang telah dipaparkan penulis pada bab 3 adalah Ketika pengusaha kayu kelalaian tidak menyetor kewajiban bagi hasil kepada pemodal maka terjadilah ingkar janji didalam kesepakatan atau akad yang telah disepakati oleh pemilik modal dengan pengusaha kayu, inkar janji tersebut bisa disebut juga dengan wanprestasi.

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini antara pengusaha kayu dengan pemodal untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya *ijab* dan *qabul* sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya.

Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Besaran ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*). Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan hutang piutang (*dayn*) seperti *salam, istishna', murabahah, dan ijarah*.

Wahbah al-Zuhaili dalam buku *Nazariyah al-Dhaman* menyatakan bahwa *ta'widh* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.

Sementara itu hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, menurut ketentuan hukum *fiqh* hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret.

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi pengusaha kayu kepada pihak kreditur dalam hal ini pemodal, dan atau penahanan

Berdasarkan dari hasil peneliti dari penelitian yang dilakukan ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk kemajuan kerjasama antara pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

1. Apabila akan melakukan sebuah perjanjian *Malah* bagi hasil ketika terjadi suatu perjanjian, harus ada perjanjian secara tertulis dan juga ada saksi yang menyaksikan, apabila terjadi wanprestasi lagi terdapat bukti yang kuat.
2. Penyelesaian yang paling tepat diselesaikan melalui musyawarah dan penyelesaian melalui jaminan yang diberikan, selain itu upaya penyelesaian melalui *Rescheduling, Reconditioning, serta Restructuring.*
3. Apabila terjadi wanprestasi berupa kelalaian dalam membayar kewajiban bagi hasil maka hendaknya kelalaian tersebut wajib dilunasi.

- Nawawi, Ismaili. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan sosial)*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.
- S, Ryan Intami. “Perspektif Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil pemilik usaha dengan investor (Studi CV. Alief Jabon Suplier dan Pembibitan Kayu Kehutanan Sukarame Bandar Lampung)”. Skripsi-UIN Raden Intan, Lampung, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* Jilid 12. Bandung: al-Ma’arif, 1998.
- Salamah, Umi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kayu Jati di penggergajian ‘Idola’ Jambu Timur Mlonggo Jepara”. Skripsi-IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2003.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: 2008.
- Sidarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI-UINSU PRESS, 2018.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Arga Printing, 2007.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Syafei Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2001.
- Syafitri. Eka Nur. “Analisis faktor-faktor sebab terjadinya wanprestasi dan penyelesaiannya pada produk Murabahah” (Studi Pada BMT Mitra Usaha Lampung Timur”. Skripsi- UIN Raden Intan, Lampung, 2018.
- Widad, Siti Zahrotul. “Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada Hibah Tanah di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan”. Skripsi- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Yazid, Aby’ Muhammad Bin. *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1 (Libanon: Da>r al-Kutub 2004), 720, Ha{dith no 2280.
- Edi Pengusaha Kayu. *Wawancara*, Sidoarjo, 30 Maret 2020
- Heny Andrysol Pemilik Modal. *Wawancara*, Sidoarjo 25 Maret 2020
- Muslich Kepala Desa Gelam. *Wawancara*, Sidoarjo, 18 Maret 2020
- Yuli Hayani Pemilik Modal. *Wawancara*, Sidoarjo, 21 Maret 2020
- <https://www.kajianpustaka.com/2019/01/wanprestasi.html> diakses pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 jam 02:06 WIB.